

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu komponen yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Prinsip Sistem Akuntansi Nasional (PSAK) No. 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu ringkasan periodik yang disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi (ACFE Indonesia, 2019). Laporan keuangan ini dihasilkan oleh pengelola perusahaan untuk mengatasi tugas yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai laporan bagi partisipan luar perusahaan. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan biasanya diperlukan bagi investor, supplier, karyawan, pemerintah, dan masyarakat untuk pertimbangan dalam membuat keputusan. Menelaah hubungan antara perusahaan dan pihak yang memiliki kepentingan terhadapnya, penelitian ini merujuk pada teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menunjukkan potensi konflik pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang terjadi karena ketidakseimbangan informasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Data dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat keandalan tinggi agar pengguna tidak mendapat kesalahpahaman. Laporan keuangan dengan tingkat keandalan tinggi lebih dipercaya oleh pengguna dalam membuat keputusan karena laporan keuangan ini menyajikan informasi tanpa ada elemen kecurangan di dalamnya. Menurut (Nawara Putri et al., 2022) integritas laporan keuangan

suatu perusahaan ditentukan oleh seberapa jujur dan akurat perusahaan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangannya.

Representasi yang setia merupakan salah satu ciri yang ditunjukkan oleh Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang erat kaitannya dengan integritas laporan keuangan. Ketika informasi keuangan disampaikan dengan jujur dan mencerminkan situasi dan kondisi perusahaan secara akurat, informasi tersebut dapat membantu pengambilan keputusan. Meskipun demikian, beberapa perusahaan tidak selalu mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Banyak sekali perusahaan memanipulasi laporan keuangan mereka, yang menunjukkan betapa pentingnya melakukan pemantauan secara teliti terhadap integritas laporan keuangan dalam lingkup perusahaan (Ayem et al., 2023). Berdasarkan beberapa definisi dan kajian, dapat diketahui bahwa integritas laporan keuangan merupakan hal utama dalam merekam kinerja suatu perusahaan, memastikan kebenaran dalam penyajian informasi yang dapat dipercaya, dan menjadi pemeran penting dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.

Integritas laporan keuangan menjadi pemeran utama dalam adaptasi perusahaan di lingkungan bisnis yang menghadapi perubahan cepat, khususnya dengan banyaknya penetrasi teknologi yang mendalam (Maharani dan Khristiana, 2022). Manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, menandakan perlunya penekanan pada kejujuran dalam pelaporan keuangan. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi juga

merusak kepercayaan masyarakat dan investor terhadap integritas laporan keuangan. Dalam menghadapi masalah ini, fokus terhadap kepatuhan standar laporan keuangan, memastikan transparansi tanpa manipulasi data, dan kebenaran data diutamakan. Budaya perusahaan yang mendorong integritas dalam pelaporan keuangan, pemantauan secara berkala, dan hadirnya sistem pengendalian internal yang kuat dapat memperkuat komitmen perusahaan dalam menjaga integritas di lingkungan bisnis yang dinamis.

Kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat melalui transparansi dan ketepatan dalam laporan keuangan yang juga mencerminkan bagaimana sistem pengendalian internal perusahaan berjalan. Kebenaran seluruh informasi yang disajikan pada laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan yang tepat. Salah satu bentuk kecurangan dalam pelaporan finansial adalah penyajian laporan keuangan yang tidak jujur. Hal ini dapat mengganggu integritas dan keandalan informasi laporan keuangan. Kecurangan dapat terjadi dari kelalaian atau tindakan terencana, yang dapat menimbulkan gambaran yang tidak akurat. Laporan keuangan yang menyesatkan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi para investor. Tindakan kecurangan yang disengaja dalam penyajian laporan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (Btr dan Hendratno, 2022).

Potensi dampak dari aktivitas fraud laporan keuangan di berbagai sektor di Indonesia diungkap oleh ACFE Indonesia (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019). Hasil survey yang melibatkan 239 responden

tersebut membuktikan bahwa 48,5% dari mereka menunjukkan bahwa sektor yang paling dirugikan akibat fraud adalah pemerintahan. Selain sektor pemerintah, terdapat sektor BUMN yang juga menjadi sorotan dengan 31,8% responden menyebutnya rentan terhadap kecurangan. Adapun perusahaan swasta tercatat 15,1%, organisasi non-profit 2,9%, dan sektor lainnya sebesar 1,7%. Tabel berikut menunjukkan jenis organisasi atau lembaga yang paling dirugikan karena fraud menurut hasil survei fraud di Indonesia tahun 2019.

Tabel 1. 1 Hasil Lembaga yang Paling Dirugikan Oleh Fraud di Indonesia Tahun 2019

Survei Fraud Indonesia 2019	
Nama	Nominal (%)
Pemerintah	48,5
Perusahaan Negara (BUMN)	31,8
Perusahaan Swasta	15,1
Organisasi Non-Profit	2,9
Sektor Lainnya	1,7
Total	100,0

Sumber: Survei Fraud Indonesia 2019

Dampak finansial yang diakibatkan dari adanya fraud menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh sejumlah sektor penting di Indonesia. Berdasarkan data pada tabel berikut, menunjukkan bahwa jenis industri yang paling dirugikan akibat adanya kecurangan adalah industri keuangan dan perbankan sebesar 41,4%. Hal ini sesuai dengan penelitian ACFE (2018) yang disebut *Report to The Nations 2018*, yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan berada di posisi pertama dalam organisasi yang terdampak oleh fraud.

Tabel 1. 2 Jenis Lembaga yang Rugi Akibat Fraud

Jenis Industri	Nominal (%)
Industri Keuangan dan Perbankan	41,4
Pemerintahan	33,9
Industri Pertambangan	5,0
Industri Kesehatan	4,2
Industri Manufaktur	4,2
Industri Lainnya	3,7
Industri Transportasi	2,1
Industri Perumahan	1,7
Industri Pendidikan	1,7
Industri Perhotelan dan Pariwisata	1,3
Industri Perikanan dan Kelautan	0,8
Total	100,0

Sumber: Survei Fraud Indonesia 2019

Industri sektor keuangan dan perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan perbankan mulai tergoyahkan. Sebagai indikasi, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan sebanyak 101 perkara per April 2023. Rinciannya, ada 79 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 17 perkara Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sebanyak 89 perkara telah diputus oleh pengadilan, diantaranya 71 perkara telah memiliki hukum tetap (in kracht), 16 perkara masih dalam tahap kasasi, dan 2 perkara dalam proses banding. Sektor perbankan tidak luput dari adanya kecurangan, salah satu kasusnya adalah adanya pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Usaha Persada Guna. Izin usaha BPR Persada Guna dicabut oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-84/D.03/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR

Persada Guna. Sebelum dicabut izinnya, BPR Persada Guna mengalami kasus hukum penyaluran kredit fiktif yang terbongkar di pengadilan dimana lima pengurus dari BPR Persada Guna terlibat.

Tanggapan mengenai kasus-kasus kecurangan yang terjadi di sektor perbankan di Indonesia menyoroti kebutuhan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dampak negatif yang diberikan dari rangkaian kasus tersebut berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional, mengancam stabilitas sektor-sektor yang vital, dan merusak kepercayaan masyarakat. Praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi solusi untuk menangani isu integritas laporan keuangan (Fadilah dan Nurasik, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, diantaranya adalah afiliasi KAP *big four* dan komite audit. Afiliasi KAP *big four* adalah hubungan antara perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* dalam melakukan audit laporan keuangannya. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Kantor Audit Publik (KAP) *big four*, yang terdiri dari Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG, dan PricewaterhouseCoopers (PwC), dianggap berpotensi meningkatkan integritas laporan keuangan suatu perusahaan karena memiliki reputasi yang kuat dan standar audit yang ketat (Auliyah et al., 2022). Independensi dan keahlian KAP *big four* dapat memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan integritas laporan keuangan, dan menambah kepercayaan para pemangku kepentingan. Adanya afiliasi dengan KAP *big four* memberikan nilai tambah dalam pengelolaan risiko dan membangun citra baik perusahaan di mata pasar ekonomi dan para investor.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa afiliasi dengan KAP *big four* berperan penting dalam memberikan informasi keuangan yang akurat, memitigasi risiko manipulasi laporan keuangan, dan menjaga integritas laporan keuangan. Selain afiliasi KAP *big four*, terdapat konteks komite audit yang juga berpengaruh dalam meningkatkan integritas laporan keuangan.

Komite audit merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang berperan dalam melindungi pemegang saham dari risiko reputasi dan turunnya nilai yang dapat timbul dari kecurangan pelaporan keuangan, korupsi, dan kegiatan suap (Rafelius Waruwu dan Andry Sugeng, 2023). Dalam mendeteksi fraud dan memprediksi adanya salah saji dalam laporan keuangan, komite audit memerlukan keahlian keuangan, sikap kehati-hatian dan ketelitian. Menurut (Rafelius Waruwu dan Andry Sugeng, 2023), dinyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan ini, dapat dianggap bahwa komite audit dalam perusahaan dapat menjadi sebuah upaya mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji empiris pengaruh afiliasi KAP *big four* dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023. Pemilihan periode penelitian ini berdasarkan meningkatnya kasus masalah integritas laporan keuangan di Indonesia serta pentingnya afiliasi KAP *big four* dan komite audit dalam integritas laporan keuangan. Dalam proses audit laporan keuangan, keterlibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dapat

memberikan dampak positif terhadap integritas laporan keuangan. Kehadiran KAP *big four* sebagai pihak yang independen dan mempunyai keahlian akuntansi yang tinggi dalam dewan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta mengurangi potensi adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Auliyah et al., 2022). Komite audit memiliki peran penting dalam menjamin integritas suatu laporan keuangan, hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, khususnya Pasal 7, menekankan pentingnya anggota komite audit yang memiliki integritas tinggi, pengalaman, serta kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Mereka diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang laporan keuangan perusahaan, bisnis, serta memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan (Prasetyo dan Harto, 2023).

Metode *Partial Least Square* (PLS) diimplementasikan untuk melihat keterlibatan afiliasi KAP *big four* dan komite audit dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis *inner model* dan *outer model* diterapkan untuk menyelidiki pengaruh dari afiliasi KAP *big four* dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Perbedaan model penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memiliki keterbaruan pada metode analisis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS), berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis regresi berganda. Selain itu, keterbaruan juga terdapat pada unit analisis yang menggunakan tahun amatan 2020-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah afiliasi KAP *big four* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2020-2023?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2020-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh afiliasi KAP *big four* terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2020-2023.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2020-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengisi teori agensi dalam literatur dengan menyajikan hubungan afiliasi KAP *big four* dan komite audit di sektor perbankan Indonesia terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini ditujukan pada sektor perbankan, yang menjadi sub sektor dari sektor yang paling

dirugikan akibat adanya kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi khusus dengan memberikan wawasan terkait karakteristik unik dari sektor perbankan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki nilai signifikan bagi Perusahaan sektor perbankan di Indonesia guna mengurangi risiko turunnya integritas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor dalam menilai integritas laporan keuangan suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.